

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ujung Pandang atau yang saat ini di kenal dengan Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah penduduk padat. Jumlah Penduduk padat tersebut terlihat dari jumlah penduduk yang semakin meningkat dari sekitar 15.000 penduduk pada pertengahan abad ke-19 menjadi kurang lebih 30.000 jiwa.¹ Pada tahun 1984 jumlah penduduk Kota Ujung Pandang mencapai angka 748.611 Jiwa. Ditahun selanjutnya mengalami peningkatan sebanyak 753.362 Jiwa. Ditahun 1985 meningkat lagi menjadi 778.581 Jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terus terjadi hingga tahun 1999 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.191.456 Jiwa.²

Kepadatan penduduk ini akhirnya berimbas pada ruang kota Ujung Pandang. Ruang kota tersebut meliputi ruang pemukiman, perkantoran, perkantoran, dan pemakaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk bukan hanya berpengaruh terhadap ruang untuk orang hidup namun hal ini juga berdampak bagi ruang untuk orang mati. Hal tersebut disebabkan tingginya jumlah penduduk di kota Makassar sehingga pemerintah perlu menyiapkan lahan pemakaman yang memadai.

Populasi penduduk yang semakin bertambah dan akan mengalami kematian setiap saat tentu memerlukan sebuah lahan yang dijadikan sebagai sarana pemakaman

¹ Portal Resmi Pemerintah Kota Makassar. “Sejarah Kota Makassar”, diakses dari <https://makassarkota.go.id>. Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul 19.01 WITA.



istakaan BPS. “Sulawesi Selatan Dalam Angka”, diakses dari kaan.bps.go.id/opac/. Diakses pada tanggal 22 September 2024 Pukul

umum, terkhusus untuk seorang muslim yang ketika meninggal akan dikubur sedangkan lahan pemakaman saat ini semakin terbatas. Dari permasalahan tersebut pemerintah setempat di dorong untuk melakukan inovasi terhadap ketersediaan lahan pemakaman.³

Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan “Tempat Pemakaman Umum” adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman menyatakan bahwa “Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala Daerah untuk masing-masing Daerah Tingkat II di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta”.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat menyatakan bahwa Tata cara pemakaman, pengabuan, dan pengaturan sewa tempat makam/kubur ditetapkan oleh walikota”. Berdasarkan peraturan pemerintah diatas dapat di simpulkan bahwa segala



Arief Sirajuddin “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Politik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Publik*, Vol. 4 (1), 2014, hlm. 3

jenis pemakaman berada di bawah pengelolaan pemerintah Daerah Tingkat II. Baik itu pemakaman Khusus dan pemakaman bukan khusus.

Kemajuan sebuah kota akan selalu memunculkan permasalahan sosial seperti kemiskinan dan tuntutan-tuntutan terhadap pelayanan pendidikan serta kesehatan.⁴ Untuk itu, setiap walikota yang menjabat haruslah memiliki cara atau kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengatasi setiap persoalan yang muncul dalam proses pembangunannya. Pada pengelolaan daerahnya banyak kebijakan yang diterapkan untuk mengatur tatanan kota Ujung Pandang. Setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, setiap daerah diberikan kesempatan untuk melakukan inovasi terhadap daerahnya. Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu kebijakan pemakaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1984 wewenang mengenai urusan "tempat kuburan" telah diserahkan menjadi wewenang otonomi Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya.

Ujung Pandang memiliki banyak tempat pemakaman namun ada yang bersifat umum dan khusus, misalnya seperti Taman Makam Pahlawan, makam berdasarkan agama ataupun milik keluarga sendiri, namun pemakaman umum untuk masyarakat yang dimiliki pemerintah hanya beberapa di kota Ujung Pandang yang tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan.

Beberapa Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh pemerintah kota Ujung Pandang yaitu;

- a. TPU Islam Dadi



Daeng Makkelo, "Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan *al of Cultural Sciences*, Vol.12 (2), 2017, hlm. 88

Pemakaman Islam Dadi terletak di Jl. Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Maricayya Selatan, Kecamatan Mamajang dengan luas 33.148 M². Pemakaman ini dibuka pada zaman Belanda, namun sempat ditutup pada tahun 1998 dan kembali di buka pada tahun 2005.

b. TPU Islam Beroanging

Pemakaman Islam Beroanging memiliki luas 45.975 M². Terletak di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo. Berdasarkan dari kuburan tertua yang ada di makam Beroanging, tercatat sejak 1948 makam tersebut telah dibuka. Namun di tahun 1961 makam Beroanging ditutup karena daya tampung pemakaman yang telah penuh. Ditahun 2005 pemerintah kota Makassar kembali membuka pemakaman Beroanging.

c. TPU Islam Paropo

Pemakaman Islam Paropo terletak di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang dengan luas pemakaman 58.500 M². Dibuka pada tahun 1958 dan ditutup di tahun 1998. Namun pemerintahan kota Makassar kembali mempergunakan pemakaman ini ditahun 2005 dengan menggunakan sistem penumpukkan jenazah.

d. TPU Maccini

Pemakaman Maccini memiliki luas 18.758 M². Terletak di Jl. Maccini Kidul, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar. Berdasarkan kuburan tertua yang ada di kompleks pemakaman, sejak 1956 pemakaman maccini telah dibuka. Namun karena lahan pemakaman telah penuh maka ditahun 1976 pemakaman Maccini



e. TPU Islam Sudiang Raya

Pemakaman Islam Sudiang Raya dibuka pada 6 Juni 1998. Pemakaman ini memiliki luas 99.469 M². Terletak di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanyya.

f. TPU Kristen Panaikang

Pemakaman Kristen Panaikang terletak di Jl. Urip Sumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panaikang. Pemakaman ini dibuka pada di tahun 1949 dengan luas pemakaman 51.500 M².

g. TPU Kristen Pannara

Pemakaman Kristen Pannara dibuka di tahun 1974 dengan luas 34.570 M². Pemakaman ini terdapat di Jl. Antang Raya, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.⁵

Dalam rentan waktu 1984-1999 banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan penggunaan lahan pemakaman. Dengan beberapa uraiaannya diatas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul ***Kebijakan Pemakaman di Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1984-1999.***

⁵ Kartini, 2019, “Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar”, *Jurnal Planearth*, Vol. 4 (2), 2019, hlm. 83



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka penulisan skripsi ini merumuskan persoalan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pemerintah terhadap penyediaan tempat pemakaman umum?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan pemakaman terhadap masyarakat?

1.3. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian sejarah, sejarawan harus membatasi ruang lingkup penelitiannya. Batasan masalah dalam historiografi terbagi menjadi dua bagian, yaitu batas tempat (spasial) dan batas waktu (temporal). Pembatasan dibuat sedemikian rupa sehingga penelitian dipusatkan pada bidang tertentu dan dalam waktu tertentu tanpa harus meninggalkan pokok bahasan. Pembatasan juga dilakukan agar penelitian lebih terfokus pada penulisan.

1.3.1. Batasan Temporal

Batasan Temporal diambil dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1999. Pilihan jangka waktu tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan. Berdasarkan Surat Ketetapan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 1984 perihal Penertiban Kuburan. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kota Ujung Pandang dalam mengelolah dan menyediakan fasilitas umum dalam hal ini yaitu pemakaman.



1.3.2. Batasan Spasial

Lingkup Spasial dari penulisan ini yaitu Kota Ujung Pandang. Kota Ujung Pandang di pilih sebagai lokasi penelitian karena Ujung Pandang merupakan Ibu Kota Provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga dibutuhkan fasilitas publik yang memadai. Fokus penelitian penulis adalah Pemakaman di Kota Ujung Pandang yang dikelola oleh pemerintah Daerah. Adapun beberapa pemakaman tersebut yaitu; TPU Islam Dadi, TPU Islam beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Islam Sudiang Raya, TPU Islam maccini, TPU Kristen Panaikang, dan TPU Kristen Pannara.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui kebijakan pemerintah kota Ujung Pandang tentang pengelolaan Pemakaman di tahun 1984-1999.
- b. Menyetahui pengelolaan pemakaman yang berada di bawah naungan pemerintah kota Ujung Pandang.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaar dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai literatur untuk menambah referensi tentang kebijakan dan pengelolaan lahan pemakaman di Kota Ujung Pandang.
- b. Sebagai sumber pengetahuan baru mengenai kebijakan yang terjadi di Kota Ujung Pandang.



1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang Pemakaman telah banyak dilakukan oleh para ahli diantaranya penelitian yang ditulis oleh Hasrianti dkk yang berjudul “Anasir Eropa Pada Bangunan Kubah Di Kompleks Makam Lajangiru, Kota Makassar”. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa makam La Jangiru diidentifikasi sebagai makam tertua yang ada di Makassar, namun dalam tulisan tersebut tidak dijelaskan alasan mengapa makam La Jangiru dapat ditetapkan sebagai makam tertua di Makassar⁶.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fahmiah yang berjudul “Model Penataan Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar”, skripsi ini sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP), akan dibahas lebih lanjut mengenai jenis ruang terbuka hijau yaitu Pemakaman. Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau untuk menambah keindahan kota dan dapat berfungsi sebagai area daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota⁷.

Tesis lain yang membahas tentang pemakaman yaitu penelitian yang ditulis oleh Kartini dengan judul penelitian “Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota

⁶ Adliyah Nurul.dkk, “Anasir Eropa Pada Bangunan Kubah Di Kompleks Makam Lajangiru, Kota Makassar”, *Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan*, Vol. 21 (2), 2023, hlm. 13



Fahmiah, Modl Penataan Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di . Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021

Makassar”. Dalam tesis ini membahas mengenai peruntukkan lahan untuk masyarakat kota Makassar, sistem penumpukan makam guna meminimalisir perluasan lahan pemakaman hingga modifikasi bentuk makam⁸.

Artikel yang ditulis Andi Nurmawati dkk dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman Umum Di Kota Makassar”. Tulisan ini menjelaskan peran pemerintah sebagai regulator yang menyebabkan terkendalanya penyediaan lahan pemakaman umum di kota Makassar yaitu: a. Pemerintah sebagai penentu Kebijakan pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang dapat menjadi patokan dalam meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan penertiban lahan pemakaman umum di setiap wilayah kota makassar. b. Mengupayakan Efisiensi dan Peningkatan Layanan. dalam mengupayakan efisiensi dan peningkatan pelayanan belum maksimal dan masih jauh dari harapan yang diinginkan, hal ini disebabkan karena penumpukan jenazah dengan keluarga yang sebelumnya yang meninggal sebagai ketetapan untuk mengesfesiengkan lahan selain itu, pengadaan fasilitas maupun perbaikan fasilitas yang ada di Setiap pemakaman tersebut tidak terlalu diperhatikan⁹.

Tesis yang ditulis oleh Nur Laely dengan judul “Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942”. Tesis ini menjelaskan proses peralihan dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem pemerintahan kolonial.

⁸ Kartini, “Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar”, *Jurnal Planoverth*. Vol. 4 (2), 2019, hlm. 86.



awati dkk, “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Lahan Pemakaman di Makassar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3 (3), 2017 hlm.275.

Sistem administrasi pemerintah kolonial, hingga pengaruh sistem pemerintahan kolonial terhadap politik dan aktivitas perekonomian di *Onder Afdeling Bonthain*¹⁰.

Rahmat hidayat menulis artikel “Analisis Penerimaan Retribusi Pemakaman Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar”. Tulisan ini menjelaskan beberapa tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemerintah sudah penuh. Dijelaskan bahwa Makassar saat ini memiliki 7 TPU yakni TPU Sudiang Raya, TPU Beroanging, TPU Dadi, TPU Paropo Islam (Panaikang), TPU Panaikang Kristen, TPU Pannara Kristen (Antang), TPU Islam Maccini. Berdasarkan tabel penelitian diketahui bahwa realisasi penerimaan retribusi pelayanan pemakaman pada Dinas Lingkungan hidup Kota Makassar selalu melebihi target. Dinas Lingkungan Hidup, UPT pemakaman Membuat Prosedur Pembayaran retribusi pelayanan pemakaman sehingga mempermudah wajib retribusi dalam melakukan pembayaran¹¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Budiharto dkk dengan judul “Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar”, menjelaskan ini mengenai sisa lahan pemakaman dan daya tampung kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar 20 tahun kedepan serta menyusun arahan pengembangan lahan pemakaman di Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan pemakaman umum di Kota Makassar sudah tidak mampu menampung jumlah kematian hingga tahun 2041. Kota

¹⁰ Nur Laely, 2018, “*Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*”, Universitas Negeri Makassar, makassar, hlm.3



at Rahmat, “Analisis Penerimaan Retribusi Pemakaman Pada Dinas idupKota Makassar”, *Income Journal: Accounting, Management and arch*, Vol. 1 (3), 2022, hlm.102

Makassar memiliki banyak tempat pemakaman namun ada yang bersifat umum dan Khusus, misalnya Seperti Taman Makam Pahlawan, Makam Berdasarkan Agama ataupun Milik Keluarga Sendiri, Namun pemakaman umum untuk masyarakat yang dimiliki pemerintah hanya beberapa di Kota Makassar yang tersebar di beberapa kecamatan dan kelurahan¹².

Tesis yang ditulis oleh Ilham Arief Sirajuddin yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar”. Tulisan ini meneliti tentang pengimplementasian Peraturan Daerah no.8 Tahun 2009 di Kota Makassar.menegenai pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Tulisan ini juga menganalisis kualitas implementasi elayanan publik dasar bidang sosial di bidang sosial di Kota Makassar¹³.

Skripsi yang tulis oleh Nurul Adliyah yang berjudul “Nisan arca dalam ruang budaya etnik Makassar”. Nisan arca sebagai produk budaya pada masa peradaban Islam di wilayah Etnik Makassar merupakan pengaruh budaya dari masa megalitik, atau masa yang ditandai dengan tradisi mendirikan monumen batu besar. Dalam perkembangannya budaya megalitik tetap hidup mempengaruhi dan mengalami pembauran dengan budaya Islam. Nisan arca ditemukan di 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, baik pada wilayah etnik Bugis dan Makassar. Penelitian ini sendiri hanya fokus terhadap tinggalan

¹² Budiharto Tri dkk, “Analisis Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar”, *Jurnal of Urban Planning Studies*, Vol. 3 (3), 2023, hlm 259.



¹³ Arief Sirajuddin “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Publik*, Vol. 4 (1), 2014, hlm. 13

nisan arca pada Kompleks Makam Islam di wilayah Etnik Makassar. Ada beberapa situs yang menjadi objek kajian, yaitu di Kabupaten Jeneponto pada Kompleks Makam Raja-Raja Binamu, Joko dan Karaeng Sengge, di Kabupaten Bantaeng pada Kompleks Makam La Tenri Ruwa, Lanynying dan Situs Lampporo, kemudian terakhir di Kabupaten Maros pada Kompleks Makam Matakko¹⁴.

1.6.2. Landasan Konseptual

Menurut **Carl Friedrich**, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Perda Kota Makassar No. 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan mayat di kota Makassar, pemakaman adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahad atau mengebumikan pada tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya. Tempat pemakaman dan pengabuan mayat adalah sarana yang disiapkan oleh pemerintah kota untuk pemakaman dan pengabuan mayat kepada penduduk kota dan penduduk luar kota sedangkan Tempat Pemakaman Khusus, pengabuan dan penitipan mayat khusus adalah sarana yang disiapkan oleh orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya untuk pemakaman, pengabuan dan penitipan mayat.



¹⁴ Adliyah Purnamasari, 2021, “Nisan Arca Dalam Ruang Budaya Etnik ipsi, Makassar, hlm.3.

Kota Ujung Pandang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan, salah satu sarana fasilitas sosial adalah lahan pemakaman. Tidak dapat dipungkiri, lahan pemakaman jenazah sangatlah dibutuhkan bagi manusia.

1.7. Metode Penelitian

Dalam penulisan beberapa upaya yang dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa sejarah yang menjadi objek penelitian, maka dari itu penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan Sejarah

Dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan kajian pustaka terhadap tema atau topik yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti akan membandingkan tema atau topik yang akan diteliti dengan peristiwa yang sama di tempat lain. Sehingga peneliti dapat melakukan peninjauan konseptual dan menempatkan pada konteks sejarah.

2. Mengumpulkan Sumber Sejarah

Pengumpulan sumber sejarah dilakukan baik itu berupa sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang diperoleh penulis diantaranya:

Peta Daerah Kota Ujung Pandang “Situasi Pekuburan Kristen Di Panaikang tahun 1984”. Peta ini menggambarkan posisi lahan pemakaman kristen lama dan tanah yang akan di beli. Serta menggambarkan lokasi disekitar lahan pekuburan.

Surat keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang membentuk Satuan Tugas Kelompok Kerja Pemindahan Kerangka Jenazah



Dari Pekuburan Bantu Jangang Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Ke Pekuburan Bolangi Kabupaten Dati II Gowa”. Dalam arsip tersebut menjelaskan tentang tugas dari Satgas tersebut guna untuk memperlancar kegiatan pemindahan kerangka Jenazah.

Arsip “Laporan Kronologis Tentang Pembebasan Tanah Yang Dilakukan Oleh Pemda Kodya Dati II Ujung Pndang Di Desa Peccele kang Dan Di Desa Bollangi Kabupaten Dati II Gowa Untuk Persiapan Tanah Pekuburan”. Arsi tersebut membahas mengenai proses perencanaan pemindahan tanah pekuburan Cina yang akan digunakan untuk pembangunan Kantor Gubernur.

Arsip Surat Edaran Departemen Agraria Tahun 1957 “Tempat pemakaman jenazah untuk penduduk Tionghoa”. Membahas mengenai surat edaran yang ditujukan kepada semua Wali Kota Besar/Kecil agar melaksanakan ketentuan yang telah di jabarkan di dalam surat edaran edaran diantaranya: ketentuan untuk kuburan umum dan kuburan partikelir, pengukuran lahan untuk setiap pemakaman.

Arsip Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Menteri Dalam Negeri Tahun 1985 “Data Program Pembangunan”, surat tersebutmenjabarkan tentang rencana pemindahan kuburan Cina di Panaikang dan rencana Pemugaran Makam Pahlawan Nasional Pangran Diponegoro.

Arsip Yayasan Sosial Kong Tiong Hwee tahun 1985. Arsip tersebut membahas tentang usul penunjukkan lokasi untuk tanah pekuburan Tionghoa. Dalam arsi tersebut menyebutkan beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat pemakan

ionghoa.



Selain itu terdapat pula sumber pendukung ialah buku, jurnal, surat kabar, website pemerintah setempat serta skripsi yang diperoleh dari ruang baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Adapun wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Penjaga Makam Panaikang dan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup.

3. Kritik Sumber, tahap pemeriksaan terhadap berbagai informasi dan fakta dari berbagai sumber yang telah diperoleh pada saat proses penelitian. Dengan bantuan kritik sumber maka penulis akan mendapatkan kesesuaian sumber dengan isinya. Langkah ini juga menentukan apakah sumber yang didapatkan rasional atau tidak (keaslian dan kredibilitas).
4. Langkah selanjutnya adalah interpretasi, tahap ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami sumber-sumber data yang digunakan dalam suatu konteks tertentu. Ini melibatkan memeriksa kualitas, relevansi, dan validitas data yang digunakan dalam analisis. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau mendapatkan fakta.
5. Melakukan Penalaran Kronologis

Pada tahap ini, peneliti akan melihat kausalitas atau sebab-akibat dari peristiwa sejarah yang sedang diteliti, serta mencari hubungan antara sumber yang diperoleh dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Dalam tahap ini peneliti juga dapat membandingkan perubahan yang terjadi berdasarkan sumber dalam rentang periodisasi yang telah ditentukan.



Gunakan Argumen Historis dengan Dukungan Sumber dan Bukti Sejarah

Tahap ini merupakan tahap akhir , penulis akan mulai menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan diawal dengan menggunakan sumber-sumber yang diperoleh selama penelitian. Penulis akan menuangkan fakta-fakta

1.8.Sistematikan Penulisan

Bab I, bab ini berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika enulisan.

Bab II, pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum pemakaman, bagaimana pengelompokkan pemakaman umum dan pemakaman khusus.

Bab III, pada bab ini membahas mengenai kebijakan pemerintah mengenai pemamakan di Kota Makassar.

Bab IV, pada bab ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah Kota Makassar tentang retribusi pemakaman.

Bab V, bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari bab 1 samai bab 4 sebagai jawaban atas permasalahan pada pendahuluan.



BAB II

KOTAMADYA UJUNG PANDANG PADA MASA ORDE BARU

2.1. Kondisi Geografi Kotamadya Ujung Pandang

Secara Administratif Kotamadya Ujung Pandang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu Kotamadya Ujung Pandang juga sebagai sub wilayah 1 Pembangunan Sulawesi Selatan yang meliputi Kotamadya Ujung Pandang, Kabupaten Pangkep, Maros, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba dan Selayar. Secara Geografis Kotamadya Ujung Pandang merupakan pintu gerbang Wilayah Indonesia Bagian Timur. Kotamadya Ujung Pandang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan dengan titik koordinat $119^{\circ} 27' 79''$ - $119^{\circ} 32' - 31, 03''$ BT dan $5^{\circ} 31' 30,81''$ - $5^{\circ} 14' 6,49''$ LS. Kotamadya Ujung Pandang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah selatan, dan Selat Makassar di sebelah barat. Kotamadya Ujung Pandang 175,77 km atau 0,28 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 11 wilayah kecamatan dan meliputi 62 kelurahan, merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0-2 derajat diapit dua muara sungai yaitu sungai Tallo dan sungai Jeneberang.¹⁵

Kotamadya Ujung Pandang memiliki kondisi iklim dan geografis yang unik, kota ini dikenal dengan kota bahari yang beriklim tropis dengan rata-rata $22^{\circ} - 32^{\circ}$ C dan hanya mengenal dua musim saja, yaitu musim kemarau. Musim hujan berlangsung bulan Oktober hingga April pada waktu awal tahun. Musim kemarau berlangsung antara bulan



Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kotamadya Ujung
Panda: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hlm. 10

Mei hingga September. Curah hujan pada umumnya tinggi, yaitu 2000-3000 mm pertahun dengan hari-hari hujan rata- rata 108 hari pertahun. Arah angin 210 o 15 'bujur timur atau arah selatan daya dengan kecepatan angin rata-rata 5,1 km dan kelembaban antara 73%-86%.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1964 (Lembar Negara Tahun 1964 No. 94 Pasal 2 ayat 3), Makassar ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan sedangkan berdasarkan Undang- Undang No.18 Tahun 1965 dalam kedudukannya sebagai Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar berubah nama menjadi Kotamadya Ujung Pandang berdasarkan peraturan Pemerintahan No.51 Tahun 1971.¹⁷ Kotamadya Ujung Pandang merupakan kota strategis di Kawasan Indonesia Timur, baik dari segi ekonomi, budaya maupun sosial. Hal tersebut didorong dengan adanya perubahan batas administratif dan perkembangan wilayah pada tahun 1971.

Hal tersebut menandai peningkatan jumlah penduduk dan transformasi kota dari sebuah kota kecil menjadi pusat urban yang lebih besar. Dengan peraturan pemerintah No. 51 tahun 1957, dalam rangka perluasan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai wilayah Kabupaten Gowa dialihkan ke dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang. Wilayah kabupaten terbagi atas beberapa kecamatan. (Yatim N, 1983). Pada tahun 1967

¹⁶ Anwar Arifin ,Pergulatan Politik di Makassar 1945- 1966. (Tangerang Selatan: Pustaka Irvan,2019), hlm. 31-32.



iddin Tika et.al. Makassar Tempo Doeloe. (Makassar: Lembaga Kajian Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, 2011), hlm. 19-20.

Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi 21 Kabupaten dan dua Kotamadya, dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 100.500 km².¹⁸

Pada tahun 1971 Kotamadya Ujung Pandang mengalami perluasan wilayah, pada tanggal 1 September 1971 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tentang “Perubahan Batas - Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”, memutuskan Daerah Kotamadya Makassar diperluas dengan memasukkan sebagian daerah, Adapun beberapa daerah sebagai berikut: 1.Kabupaten Gowa yang meliputi desa: Panaikang, Barombong, Karuwisi, Tello Baru, Antang, Tamangappa, Jongaya, Rappocini, Maccini Sombala dan Mangasa. Kabupaten Maros yang meliputi desa: Daya, Bira, Sudiang, Tamalanrea dan Bulurokeng. 2.Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi desa: Barang Caddi, Barang Lompo, dan Perjuangan/Kodingareng.¹⁹

Hingga di tahun 1971, Kota Makassar meliputi wilayah seluas 21 km² dengan penduduk sekitar 432.000 jiwa, yang tersebar pada delapan kecamatan (distrik). Mulai tahun 1971 (PP. No. 51/1971), kota ini diperluas menjadi 175 km² dengan tambahan 3 kecamatan sehingga memiliki penduduk sebanyak 434.766 jiwa. Nama kota pun berganti

¹⁸ Anwar Arifin, *Pergulatan.....* (Tangerang Selatan: Pustaka Irvan,2019), hlm.32

¹⁹ Akhmad Akbar Abdullah, et.al. “Perpindahan Karena Perluasan: Masuknya Wilayah Kota Makassar 1971”. *Jurnal Pattingaloang* Vol. 5 No. 4, 2018.



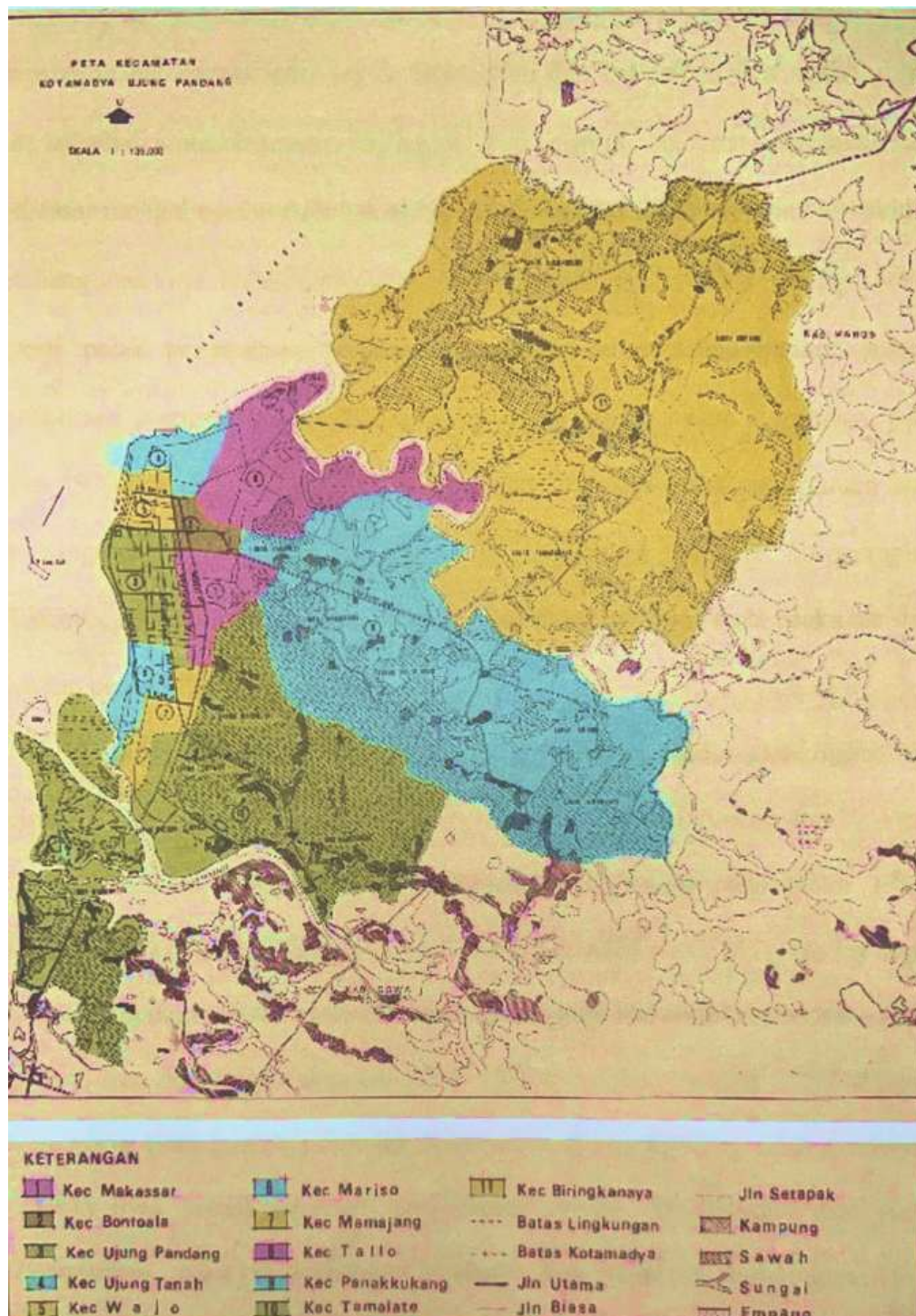
menjadi Ujung Pandang.²⁰ Makassar mendapat perhatian khusus tatkala nama itu harus berganti dengan nama Ujung Pandang (1 September 1971). Nama Makassar berubah menjadi Ujung Pandang berdasarkan peraturan pemerintah No. 51/1971.²¹ Wilayah administratif (kecamatan) bertambah pula dari delapan menjadi sebelas kecamatan. Kemudian nama Ujung Pandang berubah lagi menjadi Makassar tahun 1999.²²

²⁰ Anwar Arifin, *Pergulatan.....* (Tangerang Selatan: Pustaka Irvan,2019), hlm.31-32

²¹ Anwar Arifin, *Pergulatan.....* (Tangerang Selatan: Pustaka Irvan,2019), hlm. 19



r Arifin, *Pergulatan.....* (Tangerang Selatan: Pustaka Irvan,2019), hlm.



Gambar 2.1 Peta Kotamadya Ujung Pandang Setelah Diperluas
iku.Menyingkap Tabir Kegelapan Fragmen Revolusi pemangunan).



2.2. Kondisi Penduduk

Pada umumnya masyarakat perkotaan merupakan masyarakat pendatang. Diketahui bahwa secara relatif hanya beberapa suku di antara penduduk Indonesia yang mempunyai dorongan yang kuat untuk merantau seperti : orang Bugis, orang Batak, dan orang Minangkabau.²³ Namun demikian ini tidak berarti bahwa suku-suku lain tidak melakukan migrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan adanya keanekaragaman suku-suku bangsa yang berdiam di kota ini. Mereka berasal dari perantauan-perantauan suku Banjar, Minahasa, Sangir, Ambon (orang Maluku), Timor, Madura, Tanimbar, Buton, Cina, India, Arab, di samping perantau-perantau lokal seperti orang Mandar, Toraja, dan orang-orang Masenreng Pulu.

Perpindahan suku-suku bangsa tersebut di atas, dari tempat asalnya ke Kotamadya Ujung Pandang, mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Dari berbagai hasil penelitian tentang migrasi, atau perpindahan penduduk dari daerah lain ke Kotamadya Ujung Pandang, diperoleh kesimpulan bahwa dorongan yang terkuat penyebab migrasi, ialah alasan ekonomi, di samping alasan-alasan lain seperti adat-istiadat dan Pendidikan.²⁴ Akibat arus urbanisasi yang semakin pesat mengakibatkan Kotamadya Ujung Pandang mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin mencolok. Dalam periode 1980-1990 pertumbuhan penduduknya mencapai rata-rata 2,92 % tiap tahun. Ini berarti bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Sulawesi Selatan (1,26%).

²³ Naim, M. (1977). "Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau". (Yogyakarta: Jniversity Press). Hlm.83

Hlm. 83



Peningkatan penduduk Kotamadya Ujung Pandang setiap tahun semakin signifikan. Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 1991 jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang mencapai 944.372 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdiri atas 310.090 jiwa usia anak-anak dan 634.282 jiwa usia dewasa. Hasil sensus pada tahun 1995 menunjukka bahwa jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.077.455 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,5% per tahun sedangkan rata-rata kepadatan penduduk 6.129/km.²⁵ Dari jumlah penduduk tersebut, dapat pula diliat berdasarkan klasifikasi agama lain: agama Islam 814.240 orang, Khatolik 26.552 orang, Protestan 74.497 orang, Hindu 4.873 orang dan Budha 24.210 orang.²⁶ Peningkatan jumlah penduduk ini diakibatkan karena adanya beberapa factor, diantaranya adalah kedatangan para pedagang, pengusaha, dan kaum cendekiawan di kota tersebut, perpindahan penduduk desa ke kota untuk mencari kerja , adanya penduduk desa yang ingin menuntut ilmu di kota dan sebagainya.²⁷

²⁵ Syahrudin Mansyur. (2010) “Konstruksi Baru Pameran Museum Kota Makassar“. (Tesis. Depok: Universitas Indonesia). Hlm. 34.

²⁶ Arfa, (1994) “ Pembinaan Disiplin Di Lingkungan Masyarakat Kotamadya Ujung Pandang”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), Hlm. 12



lawati, Pembangunan Kota Makassar dalam Periode Negara Indonesia 50, (Skripsi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin: Belum 4). Hlm. 50.

Tabel 2.1. Perkembangan Penduduk Kotamadya Ujung Pandang dari tahun 1984-1999

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Ujung Pandang (Jiwa)
1984	748.611
1985	753.362
1986	778.581
1987	806.129
1988	821.957
1989	822.013
1990	944.372
1991	971.947
1992	1.000.328
1993	1.019.948
1994	1.048.201
1995	1.077.445
1996	1.107.267
1997	1.125.163
1998	1.154.020
1999	1.191.456

Sumber : Badan Pusat Statistik Kotamadya Ujung Pandang

Dari table 2.1 memberikan informasi bahwa sejak tahun 1984-1999 jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang terus meningkat. Jumlah Penduduk Kotamadya mengalami peningkatan penduduk sebanyak 2,5% - 50% setiap tahunnya.



Pada taun 1984 jumlah penduduk Kotamadya Ujung Pandang mencapai 748.611 penduduk hingga ditahun 1999 jumlah penduduk bertambah hingga 1.191.456 orang.

Pada awal abad ke-20, Kota Makassar telah banyak terdapat suku bangsa lain yang bermukim, seperti Bugis, Makassar, Mandar, Cina, Melayu, Arab, Madura, Jawa, Toraja, India, Banjar, Ambon, Buton, Sangir, Minahasa, Tanimbar. Kedatangan dari berbagai suku bangsa tersebut mereka berperan dalam sektor perekonomian. Pada umumnya diantara mereka ada yang bekerja sebagai tukang, buruh, pedagang, pegawai, nelayan, polisi, pelayan took, tukang sepatu, tukang kayu, tukang pangkas rambut, serta pandai emas (pengrajin khusus mengolah emas). Dengan adanya kehadiran mereka sangat berperan dalam pembentukan identitas di Kota Makassar dan menjadikan Makassar sebagai sebuah Kota yang multietnis.²⁸ Jumlah penduduk terbanyak merupakan suku Bugis dan Makassar yang berasal dari Sulawesi yaitu, Toraja dan Mandar. Suku lain yang berasal dari luar Sulawesi Selatan yakni, ambon, Timor, Bima, Buton, dan Bahkan Cina, dari keragaman suku menciptakan pula keanekaragaman dalam kota semakin tinggi.²⁹

Penduduk Makassar memiliki sifat dan karakter yang hampir sama dengan orang Bugis. Ia memiliki sifat-sifat demokratis dan sangat menghargai kekeluargaan, selain itu mereka juga dikenal sebagai orang yang peramah sangat menghargai orang lain serta

²⁸ Asmunandar. Re-Identitas Kota Lama Makassar, *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol.15 No. 1, 2020. Hlm. 9.

²⁹ Abu Hamid, et.al. (1985). "Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses l." (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah).



sangat tinggi rasa keistimewaannya, mereka juga terkenal dengan sifatnya yang keras kepala. selain itu penduduk kota Makassar memiliki bentuk tubuh sedikit langsing, berotot, dan warna kulinya yang sawomatang. Mereka juga memiliki bahasa yang berbeda dengan bahasa orang Bugis, bahasanya adalah vokalis, tidak mempunyai mede klinker.³⁰

2.3. Urbanisasi dan Perkembangan Lahan Kota

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berimplikasi terhadap peningkatan berbagai kebutuhan seperti perumahan, industri, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, peningkatan berbagai kebutuhan hidup tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan/ruang perkotaan, seperti Rahan Terbuka (RT) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi lahan perumahan, lahan industri, perkantoran, sekolah dan lain-lain.³¹ Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan yang senantiasa mengalami peningkatan, maka tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknologi juga terus mengalami peningkatan, yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di

³⁰ Mattulada. (2011) “Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah”. (Yogyakarta : Ombak). Hlm. 12.



ini Maru, et.al. “Perubahan Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun teration of Makassar City Land Purpose by 1990 – 2010.”

daerah pinggiran kota (*Fringe area*).³² Semakin bertambahnya penduduk kota menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap perumahan, perkantoran, dan fasilitas sosial ekonomi lain. *Urban Sprawl* terjadi dengan ditandai adanya alih fungsi lahan yang ada di sekitar kota (*urban periphery*) mengingat terbatasnya lahan yang ada di pusat kota.³³

Peran tanah yang semakin vital membawa persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yakni ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tanah memunculkan fenomena penting. Jumlah manusia dan aktivitas beserta berbagai unsur buataannya akan terus bertambah, sedangkan alam tidak berkembang bahkan terus menerus dipaksa, didesak, dan diubah untuk dapat menampung. Perkembangan aktivitas penduduk menyebabkan lahan yang tersedia lebih difokuskan kepada penyediaan lahan untuk permukiman penduduk serta kegiatan perekonomian.³⁴

Aspek perkembangan dan pengembangan wilayah tidak dapat lepas dari adanya ikatan-ikatan ruang perkembangan wilayah secara geografis. Ada 2 hal yang mempengaruhi tuntutan kebutuhan ruang yang selanjutnya menyebabkan perubahan lahan yaitu:

- 1) Adanya perkembangan penduduk dan perekonomian
- 2) Pengaruh sistem aktivitas, sistem pengembangan , dan sistem lingkungan.

³² Eka Syahfitri, *et.al.* (2021). “Fenomena Urban Sprawl Dan Pola Pergerakan Di Kota.” (Makassar: Pusaka Almida). Hlm. 5.



Syahfitri. *Ibid.*, Hlm. 7.

Syahfitri. *Ibid.*, Hlm. 7

Pada masa pemerintahan walikota Makassar Dg. Patompo (1965-1978), pada tanggal 1 september 1971 Kota Makassar diperluas menjadi 17.577 ha dengan 11 kecamatan yaitu: Makassar, Mariso, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Bontoala, Mamajang, Wajo, Tallo, Panakukang, Biringkanaya, dan Tamalate. Dengan itu Daerah Pusat Kegiatan (DPK) tersebar meliputi Kawasan kota lama dan Kawasan kota baru, Kawasan kota lama lebih fokus teradap kegiatan perniagaan yang memang awal sejarahnya area tersebut merupakan pusat niaga pada masa kolonial, sedangkan kota baru lebih fokus ke arah peruntukan permukiman untuk menampung lonjakan penduduk yang masuk ke Kota Makassar pasca kemerdekaan RI.³⁵ Pada tahun yang sama terjadi pula penambahan wilayah yang sedang dibangun dengan luas wilayah 30,87 Km².



nto, A., Trisutomo, S., & Toban, Z. Perkembangan Struktur Ruang di Kota
al Wilayah & Kota Maritim (Journal of Regional and Maritime City
2013.

Tabel 2.2 Wilayah Administrasi KotaMadya Ujung Pandang

Kecamatan	Luas (Km ²)	Kelurahan
Mariso	1,82	9
Mamajang	2,25	13
Tamalate	29,44	20
Makassar	2,52	14
Ujung Padang	2,63	10
Wajo	1,99	8
Bontoala	2,10	12
Ujung Tanah	5,94	12
Tallo	5,83	15
Panakukang	41,19	17
Biringkanaya	80,06	12
Jumlah	175,77	142

Sumber : Badan Pusat Statistik Kotamadya Ujung Pandang

Tabel 2.2 memberikan informasi mengenai wilayah administrasi Kotamadya Ujung Pandang yang terbagi ke dalam beberapa kecamatan beserta luasnya masing-masing, jumlah kelurahan, RW (Rukun Warga), dan RT (Rukun Tetangga). Dapat dilihat bahwa Kecamatan terluas yang ada di wilayah Kotamadya Ujung Pandang yaitu: Kecamatan Tamalate dengan luas wilayah 29,44 Km². setelah itu Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 80,06 Km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah Mamajang dengan luas wilayah 2,25 Km². Sementara itu dari sisi jumlah kecamatan Tamalate memiliki jumlah kelurahan sebanyak 20 Kelurahan,



sedangkan Kecamatan Wajo memiliki jumlah kelurahan paling sedikit sebanyak 8 Kelurahan. Untuk jumlah RW, Kecamatan Tamalate memiliki jumlah terbanyak yaitu 175 RW, dan Kecamatan Bontoala paling sedikit 38 RW. Untuk RT, kecamatan Tamalate masih termasuk dalam wilayah terbanyak dengan jumlah wilayah 917 RT, sedangkan Kecamatan Bontoala dengan jumlah paling sedikit dengan total RT 142 RT. Jadi jika dijumlahkan Kotamadya Ujung Pandang memiliki 175,77 Km² luas wilayah yang terdiri atas 142 kelurahan, 885 RW, dan 4.446 RT. Pada tahun 1980-an Kota Makassar mengalami permasalahan kepadatan penduduk karena pemukiman yang tidak teratur dan tidak berdasarkan pada *master plan* kota. Pemukiman tumbuh tidak terkontrol dan perumahan modern yang dibangun tidak memprioritaskan aspek lingkungan.³⁶

Urbanisasi dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi. Pola dan proses urbanisasi dan perkembangan kota juga mencerminkan perkembangan ekonomi di perkotaan, khususnya kota-kota besar. Kegiatan ekonomi sekunder dan tersier, seperti perpipaan dan jasa, cenderung berlokasi di kota-kota besar. *Urbanization economies* yang sederhana dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang dapat mendorong suatu kegiatan usaha untuk berlokasi di kota-kota besar sebagai konsentrasi penduduk dan prasarana urban, baik sebagai potensi konsumen maupun sumber tenaga kerja; prasarana produksi termasuk listrik, pelabuhan, air, dan lain sebagainya, yang memungkinkan operasi kegiatan usaha tersebut secara lebih efisien. Faktor-faktor



n, I. Penyeragaman dan Wajah Buram Modernitas di Kota Makassar pada u. *Jurnal Sejarah Citra Leka*, 4(1), 24

tersebut kemungkinan besar tidak akan ditemui di kota-kota kecil, apalagi di pedesaan (rural).³⁷

Tabel 2.3 Distribusi Penggunaan Lahan Kotamadya Ujung Pandang tahun 1980an

No.	Penggunaan Tanah	Luas (ha).
1.	Perumahan	1.632,1
2.	Perusahaan	167,2
3	Industri	64,8
4.	Jasa	243,5
5.	Tanah kosong sudah diperuntukkan	42,4
Jumlah		2.150,0

Sumber: Monografi KMUP Halaman 21.

Tabel 2.3 menunjukkan penggunaan tanah terbesar pada tahun 80-an adalah tanah yang digunakan sebagai perumahan dengan luas 1.632,1 hektar (ha). Sementara sektor jasa menggunakan lahan seluas 243,5 ha, lalu diikuti oleh perusahaan yang memanfaatkan 167,2 ha, dan untuk perindustrian seluas 64,8 ha. Selain 4 sektrot diatas, adapula tanah kosong yang suda diperuntukkan dengan luas 42,4 a. Secara keseluruhan penggunaan tanah di Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1980-an mencapai 2,150,0 ha.



10, P. Urbanisasi Dan Pengembangan Kota Di Indonesia. *Jurnal Populasi*,

2.4. Kondisi Pemakaman

Ketika itu, pemakaman pun sudah diatur penempatannya dalam lokasi-lokasi tertentu. Dapat dilihat sebagai berikut:

- Pekuburan Belanda dan orang-orang Eropah lainnya: Terletak di sisi utara *Pattunuangweg* bagian barat dan *Hogepad* bagian timur, di Ujung utara *Hospitalweg*. Komplek ini mulai dari sisi timur Rumah Sakit Gigi sekarang ke barat sampai ke Jalan Nusakambangan kemudian ke utara, membelok ke timur kira-kira sejajar dengan sisi utara Rumah Sakit Akademis sekarang. Komplek ini sudah dirombak, di atasnya didirikan beberapa bangunan antara lain Rumah Sakit Gigi, Rumah Sakit Paru-Paru dan Rumah Sakit "Akademis".
- Pekuburan Cina: Terletak di sebelah utara pekuburan Belanda sampai ke Kampung Ende Caddia. Di sebelah timur batasnya sekitar Jalan Haji Agussalim sekarang dan di sebelah barat sampai ke *Van Schelegweg*. Kompleks ini sekarang sudah tidak ada, di atasnya dibangun Pasar Sentral. Pusat Pertokoan dan Kantor NV Haji Kala. Setelah dirombak, pekuburan Cina dipindahkan ke luar kota Ujung Pandang yaitu ke Panaikang.
- Pekuburan Dadi: Merupakan pekuburan orang-orang Islam. Terletak di bagian selatan pusat kota. persis di belakang Rumah Sakit Dadi. Sampai sekarang masih digunakan.
- Pekuburan Arab: Merupakan pekuburan orang-orang Arab. Terletak di kampung Bontoala, di sebelah timur *Oude Telloweg*. Oleh masyarakat setempat (pribumi)



juga menyebutnya *Jerak Sayye*, kuburan Sayid atau Syekh. Sekarang masih digunakan.

- Pekuburan Beroanging: Merupakan pekuburan orang-orang Islam. Terletak di kedua sisi *Oude Telloweg* pada sebelah utara kampung Baraya. Sekarang masih digunakan.
- Pekuburan Buttatianang: Merupakan pekuburan orang Islam. Terletak di sebelah timur kota, yaitu di kampung Rappojawaya dekat perbatasan dengan Kampung Kalu-kuang. Sekarang masih digunakan.
- Pekuburan Tallo : Merupakan pekuburan orang Islam yang terletak di Kampung Tallo Distrik Ujung Tanah. Sekarang masih. Selain itu, di kampung Tallo ini terdapat dua kompleks makam yang cukup terkenal yaitu kompleks makam raja-raja Tallo dan makan penganjur Islam Syekh Makmur Khatib Tunggal alias Datok Ri Bandang.

Perlu dikemukakan, bahwa khusus mengenai wilayah kompleks pemakaman orang-orang Belanda/Eropa dan orang Cina, oleh masyarakat setempat disebut juga derigan nama *Kampong Jerak*, kampung kubur.³⁸ Pada tahun 1950-an dilakukan pemindahan lahan pemakaman Cina yang sekarang digunakan sebagai pasar sentral



³⁸ Muchlis Paeni, *et.al.* (1984). *Sejarah Sosial Daerah Sulawesi Selatan Mobilitas kasar 1900- 1950*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan rah Dan Nilai Tradisional). Hlm.85-86.

sehingga sebagian makam yang berada di pasar sentral dipindahkan ke tpu kristen Panaikang.³⁹

Peta tersebut memperlihatkan beberapa letak pemakaman islam dan Kristen pada tahun 1991 di Kotamadya Ujung Pandang. Beberapa titik yang merupakan letak lahan pemakaman yaitu; Makam islam dan Kristen di Panaikang, makam islam di Panampu, makam Kristen di Pannara, dan makam islam di Antang. Peta tahun 1991 yang menggambarkan wilayah Kotamadya Ujung Pandang memperlihatkan sebaran letak lahan pemakaman berdasarkan agama, yakni Islam dan Kristen. Dari peta tersebut, tampak bahwa pemerintah kota pada masa itu telah menetapkan beberapa lokasi strategis untuk keperluan pemakaman, baik bagi masyarakat Muslim maupun Kristen, yang tersebar di beberapa Kawasan.

Salah satu kawasan yang menjadi titik konsentrasi pemakaman adalah Panaikang, di mana terdapat dua kompleks pemakaman yang cukup besar, masing-masing untuk umat Islam dan Kristen. Lokasi ini menandakan upaya penataan kota yang memperhatikan kebutuhan ruang pemakaman bagi dua komunitas agama terbesar di kota tersebut. Panaikang sendiri dikenal sebagai wilayah yang berkembang secara administratif dan mudah diakses, sehingga penempatannya sebagai area pemakaman memiliki nilai strategis.

Selain itu, Panampu menjadi lokasi khusus bagi pemakaman Islam. Letaknya yang berada di kawasan padat penduduk dan dekat dengan pusat-pusat permukiman tradisional menandakan keberadaan lahan pemakaman ini telah berlangsung cukup lama



ancara:Hamja, Panaikang Kota Makassar. 10 April 2025.

dan berakar dalam sejarah komunitas setempat. Di sisi lain, Pannara difungsikan sebagai area pemakaman Kristen. Keberadaan lahan ini menunjukkan penyebaran komunitas Kristen di kawasan timur kota serta pentingnya pemisahan zonasi pemakaman sesuai keyakinan keagamaan, yang mencerminkan keragaman dan toleransi dalam struktur sosial Kota Ujung Pandang.

Sementara itu, Antang menjadi salah satu titik lokasi pemakaman Islam yang relatif baru pada masa itu. Antang dikenal sebagai kawasan yang mulai berkembang sebagai permukiman pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, sehingga keberadaan lahan pemakaman di wilayah ini kemungkinan besar merupakan bagian dari ekspansi ruang kota untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan demikian, peta ini tidak hanya menunjukkan letak geografis lahan pemakaman, tetapi juga mencerminkan dinamika perkembangan wilayah, distribusi penduduk berdasarkan keyakinan, serta perencanaan tata ruang kota yang memperhatikan aspek sosial dan keagamaan masyarakat Ujung Pandang pada awal dekade 1990-an.

